



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah sebagai perwujudan pertanggungjawaban publik yang berisi tentang pengukuran tingkat keberhasilan atas kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah di dalam mencapai visi dan misinya sebagaimana yang ditetapkan dalam INPRES No. 77 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang penulisannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2020. Kami sadar bahwa LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2020 ini jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan masukan, tanggapan dan koreksi dari semua pihak guna penyempurnaan Laporan ini.

Sumenep, Januari 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. AKH. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650405 199210 1 011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
EKSEKUTIF SUMMARY	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	4
1.4 Telaahan Visi, Misi dan program	7
1.5 Isu-isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	13
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini .	13
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	13
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	14
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	14
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	14
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	16
B. Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	23



EKSEKUTIF SUMMARY (RINGKASAN EKSEKUTIF)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Organisasi. Demikian juga, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu : Bidang Pembinaan Ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa dan hak asasi manusia, Bidang Pembinaan Kewaspadaan dan Bidang Pembinaan Politik dan organisasi kemasyarakatan pada kegiatan tahun 2020 melaksanakan 3 (tiga) bidang rata-rata realisasi anggaran adalah **84,74%** atau termasuk kategori "**SANGAT BAIK**".

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep mengalokasikan dana dalam APBD tahun 2020 berupa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung masing-masing sebesar Rp. **3.038.907.754,00** dan Rp. **2.432.887.927,00**. Adapun realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. **3.038.907.754,00** atau **81,78%** dan Rp. **2.432.887.927,00** atau **88,75%**.

No.	JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	%-tase
1.	Belanja Tidak Langsung	3.716.053.385,00	3.038.907.754,00	81,78
2.	Belanja Langsung	2.741.309.627,00	2.432.887.927,00	88,75
Jumlah		6.457.363.012,00	5.471.795.681,00	84,74%

Laporan Akuntabilitas ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep didalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Tahun Anggaran 2016-2021. Harapan kami, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2020 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



BAB I

Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Dalam proses penyusunan dokumen renstra, SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumenep yaitu Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional maka penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sumenep harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi,



kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, maka penyusunan Renstra ini sangat penting sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sedangkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep ini menggambarkan visi, misi, tujuan, program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahunan maupun lima tahunan dan dalam penyusunannya diperlukan sumber-sumber yang meliputi : kebijakan pemerintah Pusat, Kebijakan pemerintah propinsi, kebijakan pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, perkembangan situasi global, regional maupun daerah, kinerja masa kini serta kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga diharapkan dalam penyusunan Rencana Strategis ini akan diperoleh suatu kegiatan yang partisipasif, transparan, komprehensif dan akuntabel mengingat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga di dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Misi agar Akuntabel;
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Harus berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan



manajemen Instansi Pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik penyaluran kinerja dan penyusunan laporan Akuntabilitas.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021 disusun dengan maksud adalah sebagai pedoman dan arahan untuk melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam menjalankan amanah visi, misi dan/atau RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep.

1.2.2. Tujuan

Sedangkan tujuan di susunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep adalah :

1. Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep
2. Menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai alat pengukuran kinerja SKPD dalam pencapaian target yang diformulakan dalam indikator keberhasilan

1.3. Gambaran Umum Organisasi

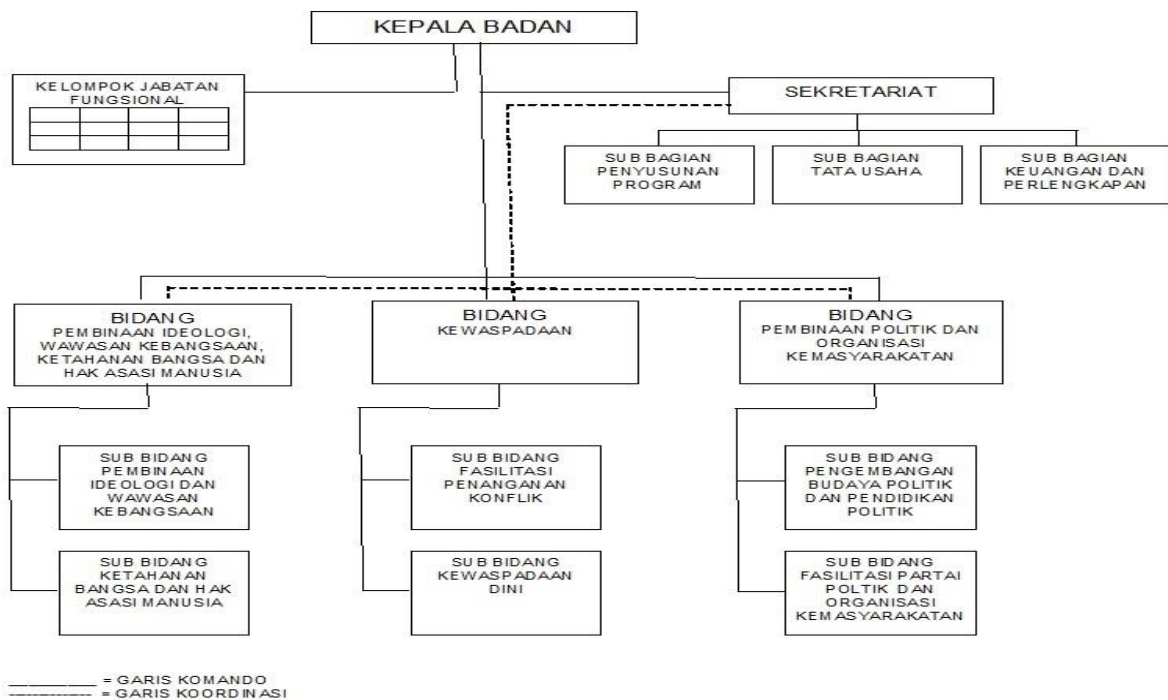
1.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan, perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis operasional



- dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik;
2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 4. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya serta penanganan konflik sosial guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISAS

1.3.2. Sumber Daya SKPD

A. Sumber Daya OPD



Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini susunan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep berdasarkan kualifikasi pendidikan :

Tabel 2.2.1

Kualifikasi Pendidikan PNS

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	S-2	5	1	5
2	S-1	9	2	9
3	D-3	-	-	1
4	SMA	20	2	20
5	SMP	1	-	1
JUMLAH		35	5	35

Dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh PNS, merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dalam menyikapi permasalahan kebangsaan dengan dibantu oleh tenaga PHL/Outsourcing sebanyak 13 orang.

B. Sarana dan Prasarana



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep di dukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Gedung dan Fasilitas

Gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep terletak di jalan Trunojoyo Nomor 141 Sumenep dan merupakan aset gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Adapun gedung ini terbagi atas :

- a. Halaman
- b. Ruang lobi
- c. Ruang Kepala Badan
- d. Ruang Sekretariat
- e. Ruang Bidang
- f. Ruang Rapat
- g. Areal parker
- h. Mushola
- i. Kamar Mandi
- j. Gudang

2. Peralatan dan kendaraan operasional

Tabel 2.2.2

Peralatan dan kendaraan operasional

No	Peralatan dan Mesin	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Mobil Dinas	4	Unit	1 Baik, 3 RB
2	Sepeda Motor	16	Unit	4 Baik, 3 RB, 9 RT
3	Lemari	16	Unit	16 Baik
4	Kulkas	6	Unit	6 Baik
6	Filling Kabinet	5	Unit	5 RB



7	Brankas	1	Unit	1 Baik
8	Meja	17	Unit	17 Baik
9	Kursi	143	Unit	54 Baik, 71 RB, 18 RT
10	AC	10	Unit	5 Baik, 5 RB
11	TV	7	Unit	4 Baik, 3 RB
12	UPS	5	Unit	5 RB
13	Komputer	11	Unit	6 Baik, 5 RB
14	Printer	12	Unit	8 Baik, 4 RB
15	Laptop	4	Unit	2 Baik, 2 RB
16	Kamera	5	Unit	2 Baik, 3 RB
17	Handytalky	5	Unit	5 Baik
18	Screen proyektor	1	Unit	1 Baik
19	LCD Proyektor	1	Unit	1 Baik
20	Faximili	1	Unit	1 Baik

Dengan sarana operasional dan pendukung yang kurang memadai merupakan kelemahan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep setiap tahun melakukan pengadaan perlengkapan perkantoran untuk mengganti yang telah rusak berat (RB) atau bahkan rusak total (RT) dengan ketersediaan anggaran yang ada.

1.4. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan janji politik pada saat kampanye, visi kepala daerah terpilih adalah "SUPER MANTAP"

yaitu : "Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional".



Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan
6. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Misi 5

Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.

Tujuan 1

Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat;

Indikator Tujuan :



Persentase Jumlah Konflik

Sasaran 1

Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Indikator Sasaran :

1. Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan
2. Jumlah demo bersifat social

1.5. Isu-isu Strategis

Meperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Sumenep, dapat dikemukakan beberapa isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dimasa 5 (lima) tahun ke depan, antara lain :

1. Mengejalanya erosi nasionalisme dan semangat kebersamaan makin menghambat proses pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Lemahnya etika, moral dan budaya politik yang beradap dapat menghambat proses demokratisasi.
3. Konflik sosial, bencana, rasa aman, ketertiban masyarakat, penegakan hukum/HAM, terorisme, narkoba, proxy war, dan isu SARA merupakan ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara.

Oleh karenanya pendidikan politik, wawasan kebangsaan, demokratisasi, penegakan hukum/HAM dan kerukunan hidup dalam aspek IPOLEKSOSBUD perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui forum komunikasi, forum fasilitasi, forum silaturahmi, rapat koordinasi terpadu dan lain-lain berdasarkan pada etika hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan komitmen yang sama dari seluruh jajaran aparatur dan tokoh-tokoh masyarakat/agama agar kesadaran untuk menjaga kerukunan, toleransi, solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan guna tercapainya



masyarakat Sumenep yang makin sejahtera sehingga dapat memperkuat kesadaran berbangsa dan bertanah air dalam wilayah NKRI.



BAB III

Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Misi 5

Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.

Tujuan 1

Meningkatkan Kualitas Nilai-Nilai Kehidupan Beragama dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sosial dan Perlindungan Masyarakat;

Indikator Tujuan :

Persentase Jumlah Konflik

Sasaran 1

Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Indikator Sasaran :

1. Prosentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan
2. Jumlah demo bersifat social



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1

Capaian Kinerja Organisasi

Dalam implementasi Sistem AKIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Bappeda Kabupaten Sumenep pelaksanaan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian kinerja ini dilakukan tim evaluasi internal untuk mengukur pengumpulan data kinerja hasilnya dapat memberikan gambaran pengawasan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut diberikan dengan memberikan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dilakukan dengan



membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi konflik sosial	Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	%	65	65	100
		Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	%	80	80	100
2.	Meningkatnya Pendidikan Politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masyarakat	Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih.	%	80	80	100

Tabel 3.1.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran Renstra 2020

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		
				TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	bobot	25,52	24,52	96,08

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
1.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi konflik sosial	Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	%	-	60	65
		Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	%	-	75	80
		Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih.	%	-	75	80
	Meningkatnya Pendidikan Politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masyarakat					

Tabel 3.2.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Renstra 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		
				2018	2019	2020
1.	Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	bobot	19,91	22,65	24,52

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Kinerja Sasaran Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RENSTRA s/d TAHUN 2020
1.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi konflik sosial	Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	%	65	70	65
		Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	%	80	85	80



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR RENSTRA s/d TAHUN 2020
2.	Meningkatnya Pendidikan Politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masyarakat	Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih.	%	80	85	80

Tabel 3.3.2
Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN s/d TAHUN 2020	TARGET 2021	CAPAIAN AKHIR TUJUAN RENSTRA s/d TAHUN 2020
1.	Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	bobot	24,52	26,5	25,52

4. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2020, dapat dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Renstra sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi Kinerja Sasaran Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
1.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi konflik sosial	Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	%	65	65	100	1.861.881.000,00	1.669.086.950,00	89,65%	10,45
		Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	%	80	80	100	225.204.500,00	214.973.500,00	95,46	4,54



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN	
	Meningkatnya Pendidikan Politik dan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) pada Masyarakat	Persentase Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih.	%	80	80	100	187.694.400,00	153.567.900,00	81,82	19,18

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh program/kegiatan dan faktor lainnya. Secara rinci penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja Tujuan/Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6.1
Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi Konflik	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	65%	65%	100%
1.	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI		80%	80%	100%
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang di administrasikan	80%	80%	100%
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	80%	80%	100%
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	80%	80%	100%
4.	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah jenis bahan perkantoran yang disediakan selama 1 tahun	80%	80%	100%
5.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang di adakan	80%	80%	100%
6.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kelengkapan administrasi, majalah dan buku peraturan yang tersedia	80%	80%	100%



NO.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALIASI	CAPAIAN
7.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	80%	80%	100%
8.	Kegiatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	80%	80%	100%
9.	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan peringatan hai-hari besar yang dilaksanakan	80%	80%	100%
10.	Kegiatan Berkala Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang disediakan	80%	80%	100%
11.	Kegiatan Pemeliharaan Berkala Rutin / Berkala Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah gedung kanntor yang dipelihara	80%	80%	100%
12.	Kegiatan Pemeliharaan Berkala Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	80%	80%	100%
13.	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	80%	80%	100%
II.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
1.	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/Bimtek	80%	80%	100%
2.	Kegiatan Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian		80%	80%	100%
III.	PROGRAM IDEOLOGI, WAWASAN, KETAHANAN BANGSA DAN HAM				
1.	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah ormas/unras mendapatkan sosialisasi	3 Ormas	3 Ormas	100%
2.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	<i>Jumlah ormas/unras mendapatkan sosialisasi</i>	3 Ormas	3 Ormas	100%
3.	Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa	Jumlah ormas/unras mendapatkan sosialisasi	3 Ormas	3 Ormas	100%
IV.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				
1.	Kegiatan Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik	Jumlah ormas/unras mendapatkan sosialisasi	10 Parpol	10 Parpol	100%
2.	Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM	Jumlah ormas/unras mendapatkan sosialisasi	1 laporan	1 laporan	100%
3.	Kegiatan Dukungan kelancaran pemilu	Jumlah ormas/unras mendapatkan sosialisasi	1 Putaran	1 Putaran	100%
4.	Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman etika dan kultur politik dalam rangka penerapan budaya poltik yang demokratis	Jumlah ormas/unras mendapatkan sosialisasi	3 Ormas	3 Ormas	100%
V.	PROGRAM IDEOLOGI, WAWASAN, KETAHANAN BANGSA DAN HAM				
1.	Kegiatan Sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik dimasyarakat	Jumlah ormas/unras mendapatkan sosialisasi	3 Ormas	3 Ormas	100%
2.	Kegiatan Forum komunikasi eksekutif legeslatif dalam format otonomi daerah	Jumlah ormas/unras mendapatkan sosialisasi	12 Kali	12 Kali	100%



1. Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja)

1) Sasaran program meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) dengan indikator program Persentase penurunan penyakit masyarakat, keberhasilan ini didukung program kegiatan sebagai berikut :

a. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan

:

- Peningkatan forum komunikasi esksukutif / legeslatif dalam format otonomi daerah

Kegiatan Forum Komunikasi Eksekutif-Legislatif Dalam Format Otonomi Daerah mengadakan Rapat atau Forum yang membahas tentang Permasalahan Daerah, dan kegiatan tersebut dilakukan 1 bulan sekali selama 1 tahun di Ruang Rapat Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, undangan yang hadir pada kegiatan tersebut, diantaranya :

- Kapolres Sumenep;
- Kodim 0827 Sumenep;
- Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep;
- Ketua Pengadilan Negeri Sumenep;
- Ketua DPRD Sumenep;
- Bapak Sekretaris Daerah Kab. Sumenep;
- Bapak Asisten I,II,III Kab/ Sumenep;
- Instansi Terkait Pemerintah Daerah Kab. Sumenep;

b. Program penyakit masyarakat (PEKAT)

- Kajian Strategis Poleksosbud Dalam Komenda

Kegiatan Kajian Strategis POLEKSOSBUD Dalam KOMENDA adalah Komite Intelegent Daerah mengadakan Rapat atau Forum yang membahas tentang Stabilitas Keamanan Daerah, dan kegiatan tersebut dilakukan 1 bulan sekali selama 1 tahun di Ruang Rapat Wakil Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Suimenep, undangan yang hadir pada kegiatan tersebut, diantaranya :

- Wakapolres Sumenep;



- Kasat Intelkam Polres Sumenep;
- Unsur Intelkam Polres Sumenep;
- Pasi Intel Kodim 0827 Sumenep;
- Unsur Intel Kodim 0827 Sumenep;
- **Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat**

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat ini melaksanakan sosialisasi 4 X di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Gapura pada tanggal 26 April 2020;
- Kecamatan Dasuk pada tanggal 12 Juli 2020;
- Kecamatan Talango pada tanggal 22 November 2020;
- Kecamatan Batu Putih pada tanggal 18 Desember 2020;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

- 2) Sasaran program Meningkatkan idiologi wawasan kebangsaan dan HAM dengan indikator program Persentase Fasilitasi pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan keberhasilan ini didukung program kegiatan sebagai berikut :

a. **Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan kegiatan :**

- **Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Kehidupan Beragama**

Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ini melaksanakan sosialisasi 7 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Ambunten pada tanggal 17 April 2020;
- Kecamatan Manding pada tanggal 08 Mei 2020;
- Kecamatan Pragaan pada tanggal 13 Juli 2020;
- Kecamatan Dasuk pada tanggal 07 Agustus 2020;
- Kecamatan Batuan pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Kecamatan Kalianget pada tanggal 14 Nopember 2020;
- Kecamatan Pasongsongan pada tanggal 14 Nopember 2020;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.



- Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Kegiatan Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa ini melaksanakan sosialisasi 6 kali di Kantor Kecamatan, diantaranya :

- Kecamatan Bluto pada tanggal 19 April 2020;
- Kecamatan Dungkek pada tanggal 15 Mei 2020;

Undangan yang hadir pada kegiatan sosialisasi diantaranya ; Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM.

- 3) Sasaran program terlaksananya dukungan kelancaran politik bermasyarakat dengan indikator program Persentase partisipasi masyarakat dalam berpolitik keberhasilan ini didukung program kegiatan sebagai berikut :

a. **Program pendidikan politik masyarakat , dengan kegiatan :**

- Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Di dalam Kegiatan ini melakukan Pemberian Bantuan Keuangan kepada 10 (sebelas) Partai Politik, diantaranya :

- Partai Demokrat;
- Partai Gerindra;
- Partai PPP;
- Partai PKB;
- Partai PBB;
- Partai PDIP;
- Partai Nasdem;
- Partai PKS;
- Partai PAN;
- Partai Hanura;

- Dukungan Kerlancaran Pemilu

Di dalam Kegiatan ini mengadakan Posko Deks Pemilu Kepala Daerah pada Tahun 2020



Realisasi anggaran program/kegiatan merupakan realisasi penyerapan anggaran program/kegiatan tahun anggaran 2020. Adapun realisasi program/kegiatan secara rinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
I.	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	433.699.327,00	367.429.177,00	-66.270.150,00	84,72%
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	1.620.000,00	1.350.000,00	-270.000,00	83,33%
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	57.000.000,00	38.989.039,00	-18.010.961,00	68,40%
3.	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	142.795.000,00	142.763.800,00	-31.200,00	99,98%
4.	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	16.576.600,00	16.428.000,00	-148.600,0	99,10%
5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.775.000,00	3.745.000,00	-30.000,00	99,21%
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				
7.	Penyediaan makanan dan minuman	3.000.000,00	1.800.000,00	-1.200.000,00	60,00%
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	89.150.000,00	73.529.792,00	-15.620.208,00	82,48%
9.	Peringatan Hari-Hari Besar	20.387.500,00	0	-20.387.500,00	0
10.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	29.527.227,00	29.527.227,00	-0	100%
11.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	20.000.000,00	19.921.319,00 (-78.681,00	99,61%
12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	44.868.000,00	34.835.000,00	-10.033.000,00	77,64%
13.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	5.000.000,00	4.540.000,00	-460.000,00	90,80%
II	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	32.830.400,00	27.830.400,00	-5.000.000,00	84,77%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000,00	0	-5.000.000,00	0
2.	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	27.830.400,00	27.830.400,00	0	100%
III	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	225.204.500,00	214.973.500,00	10.231.000,00	95,46%



NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1.	<i>Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama</i>	79.609.500,00	75.261.500,00	-4.348.000,00	97,17
2.	<i>Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa</i>	81.584.000,00	77.134.000,00	4.450.000,00	94,55%
3	<i>Penguatan Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan</i>	64.011.000,00	62.578.000,00	-1.433.000,00	97,76%
IV	<i>Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)</i>	1.861.881.000,00	1.669.086.950,00	-192.794.050,00	89,65%
1.	<i>Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat</i>	502.745.000,00	385.256.450,00	-117.488.550,00	76,63%
2.	<i>Peningkatan Dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat</i>	118.931.000,00	95.851.500,00	-23.079.500,00	80,59%
3.	<i>Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial</i>	0	0	0	0
4.	<i>Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba</i>	114.221.000,00	89.600.650,00	-24.620.350,00	78,44%
5.	<i>Forum Komunikasi Eksekutif-Legislatif dalam Format Otonomi Daerah</i>	1.227.000.000,00	1.189.500.000,00	-37.500.000,00	96,94%
V	<i>Program Pendidikan Politik Masyarakat</i>	187.694.400,00	153.567.900,00	-34.126.500,00	81,82
1.	<i>Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</i>	1.914.000,00	1.002.000,00	-912.000,00	52,35 %
2.	<i>Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM</i>	82.183.000,00	67.155.000,00	-15.028.000,00	81,71
3.	<i>Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum</i>	41.217.900,00	41.217.900,00	-0	100%
4.	<i>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Etika dan Kultur politik dalam Rangka Penerapan Budaya Politik yang Demokratis</i>	. 62.379.500,00	44.193.000,00	18.186.500,00	70,85%
TOTAL		2.741.309.627,00	2.432.887.927,00	-308.421.700,00	88,75%



BAB IV

Penutup

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumenep yang memuat pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penggagas kebijakan, program dan kegiatan yang mampu mencapai tujuan dan sasaran yang akuntable untuk mewujudkan Visi organisasi, akuntabilitas mengandung makna kewajiban memberikan pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat



Kabupaten Sumenep kepada pemberi delegasi wewenang berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

Penyusunan LKJIP ini merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) tahun anggaran, sebagai Lembaga yang akuntabel yang dapat beroperasi secara efisien dan efektif, di samping juga memberikan masukan dan umpan balik kepada para pembuat kebijakan, serta memelihara kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini lebih sering dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibandingkan sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi. Oleh sebab itu apabila dalam penyusunan LKJIP ini masih terdapat beberapa kesalahan dan kurang sempurna, maka sikap adaptif dan responsif serta kritik dan saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dimasa yang akan datang.